ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Potensi Pertentangan Norma Hukum Pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016" ini ditulis oleh Imam Nurkholik, NIM. 12103183085, Prodi Hukum Tata Negara (HTN), Universitas Islam Negeri Ali Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2022, di bimbing oleh Ahmad Gelora Mahardika, S.IP, M.H

Kata Kunci: Peraturan Menteri, Kartu Identitas Anak, urgensi kebijakan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan belum adanya kartu identitas untuk anak di Indonesia. Dengan keadaan tersebut pada tahun 2016 Pemerintah menetapkan sebuah kebijakan Kartu Identitas Anak dengan tujuan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak yang regulasinya tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Pada hakikatnya, telah terdapat sejumlah dokumen kependudukan yang menjamin terkait identitas setiap warga negara di Indonesia. Dokumen-dokumen tersebut diantaranya adalah AKTA kelahiran, KK, KTP. Setelah pemberlakuan Kartu Identitas Anak tersebut terdapat persoalan terkait batasan usia untuk memiliki kartu identitas dalam Peraturan Menteri tersebut berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, serta permasalahan lain terkait urgensi ditetapkannya kebijakan Kartu Identitas Anak tersebut. Sebagai negara hukum yang mana segala tindakan Pemerintah berdasarkan pada peraturan, regulasi yang mengatur terkait kebijakan Kartu Identitas Anak selayaknya juga harus tunduk pada peraturan perundang-undangan, baik dalam aspek formil pembentukanya maupun aspek materiil substansinya.

Fokus penelitian ini tentang potensi pertentangan norma hukum pemberlakuan peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 dengan pertanyaan sebagai berikut: 1) bagaimana kedudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 dalam sistem Perundang-undangan di Indonesia? 2) bagaimana urgensi kebijakan kartu identitas anak di indonesia menurut hukum positif dan fiqih siyasah?

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui kedudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 dalam sistem Perundang-undangan di Indonesia. 2) untuk mengetahui urgensi kebijakan Kartu Identitas Anak menurut hukum positif dan fiqih siyasah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berisikan bahan hukum primer, sekunder. Analisis data yang digunakan adalah teknis analisis deskriptif *(analyis descriptive)* dengan pendekatan perundang- undangan *(statue approach)*.

Hasil penelitian potensi pertentangan norma hukum pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak adalah 1) pembentukan regulasi kebijakan Kartu Identitas Anak melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam pembentukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan setiap

peraturan pelaksana termasuk peraturan menteri harus memuat dua persyaratan yaitu diperintahkan/didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan. Selain itu, materi yang terkandung dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 telah bertentangan dengan materi yang ada didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, materi muatan yang bertentangan kaitanya dengan batasan umur memiliki kartu identitas yang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 yang sudah memperbolehkan anak yang baru lahir untuk memiliki kartu identitas sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 hanya mewajibkan kepemilikan kartu identitas kepada warga negara yang telah berusia 17 tahun, sehingga tampak bahwasanya Peraturan menteri tersebut cacat secara formil pembentukanya dan cacat materiil substansinya. 2) pembentukan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak jika dianalisis belum terlalu dibutuhkan oleh masyarakat, dikarenakan fungsi dan manfaat dari kartu identitas anak hampir sama dengan akta kelahiran, sehingga kurang bermanfaat dalam penerapanya. kebijakan ini justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih administrasi anak. Akan tetapi menurut fiqih siyasah peraturan ini tidak melanggar ketentuan dari siyasah dusturiyah karena bertujuan demi kemaslahatan umat.

ABSTRACT

Thesis by the title ”Potential Conflict of Legal Norms for the Implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 2 of 2016 Regarding Child Identity Cards” was written by Imam Nurkholik, Registered University Student 12103183085, Departement of State Law, State Islamic University of Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2022, guided by Ahmad Gelora Mahardika, S.IP, M.H.

Keywords: *Minesterial Regulation, Child Identity Card, Policy Urgency*

This research is motivated by the problem of the absence of identity cards for children in Indonesia. With these conditions in 2016 the Government established a Child Identity Card policy with the aim of fulfilling children's rights and protecting children whose regulations are contained in the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016. In essence, there have been a number of population documents that guarantee the identity of each citizens in Indonesia. These documents include birth certificates, family cards, ID cards. After the implementation of the Child Identity Card, there are problems related to the age limit for having an identity card in the Ministerial Regulation which is different from the provisions in the Population Administration Law. as well as other issues related to the urgency of the issuance of the Child Identity Card policy. As a state of law in which all Government actions are based on regulations, regulations governing the Child Identity Card policy should also be subject to laws and regulations, both in the formal aspect of its formation and the material aspect of its substance.

The focus of this research is on the potential conflict of legal norms for the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 with the following questions: 1) How is the position of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 2 of 2016 in the Indonesian Legislative System? 2) How is the urgency of the child identity card policy in Indonesia?

The objectives of this research are: 1) to find out the position of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 2 of 2016 in the Indonesian Legislative System. 2) to find out the urgency of the Child Identity Card policy

The research method used is normative legal research with analytical descriptive nature. This study uses secondary data sources containing primary and secondary legal materials. The data analysis used is descriptive analysis technique (descriptive analysis) with a statutory approach.

The results of the research on potential conflicts of legal norms for the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards are 1) the establishment of a Child Identity Card policy regulation through the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 2 of 2016 which is contrary to the prevailing laws and regulations in Indonesia. This is because the formation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 is not in accordance with Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation which states that every implementing regulation including ministerial regulation must contain two requirements, namely ordered/delegated by a higher regulation. and formed on the basis of authority. Besides that, the material contained in the Regulation of the Minister of Home Affairs

Number 2 of 2016 is contrary to the material contained in Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, the material content that is contrary to the age limit of having an identity card is in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 2 of 2016 which has allowed newborn children to have temporary identity cards in Law Number 23 of 2006 only requires the ownership of identity cards to citizens who are 17 years old, so it appears that the ministerial regulation is formally flawed in its formation and materially defective in substance. 2) the establishment of Ministerial Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards if analyzed is not really needed by the community, because the functions and benefits of a child's identity card are almost the same as a birth certificate, so it is less useful in its application. This policy has the potential to cause overlapping child administration.

الملخص

رسالة بعنوان "تضارب محتمل بين القواعد القانونية لتطبيق لائحة وزير الداخلية رقم ٢ لعام ٢٠١٦ كتبها الإمام نوركوليك ،١٢١٠٣١٨٣٠٨٥ ، برنامج دراسة القانون الدستوري ، علي سيد علي رحمة الله علي الدولة الإسلامية الجامعة تولونغاغونغ ٢٠٢٢ ، تحت إشراف أحمد جيلورا مهارديكا ،

الكلمات الدالة:اللائحة الوزارية ، بطاقة هوية الطفل ، سياسة الاستعجال

هذا البحث مدفوع بمشكلة عدم وجود بطاقات هوية للأطفال في إندونيسيا .مع هذه الشروط في عام ٢٠١٦ ، أنشأت الحكومة سياسة بطاقة هوية الطفل بهدف الوفاء بحقوق الطفل وحماية الأطفال الذين وردت لوائحهم في لائحة وزير الداخلية رقم ٢ لعام ٢٠١٦ في الأساس ، كان هناك عدد من الوثائق السكانية التي تضمن هوية كل مواطن في إندونيسيا .تشمل هذه الوثائق شهادات الميلاد والبطاقات العائلية وبطاقات الهوية .بعد تطبيق بطاقة هوية الطفل ، ظهرت مشاكل تتعلق بالحد الأدنى لسن الحصول على بطاقة الهوية في اللائحة الوزارية والتي تختلف عن أحكام قانون إدارة السكان . بالإضافة إلى القضايا الأخرى المتعلقة بضرورة إصدار سياسة بطاقة هوية الطفل .كدولة قانون تستند فيها جميع الإجراءات الحكومية إلى اللوائح ، يجب أن تمتثل اللوائح التي تحكم سياسة بطاقة هوية الطفل أيضًا للقوانين واللوائح ، في كل من الجوانب الرسمية لتشكيلها والجوانب المادية لمضمونها.

ينصب تركيز هذا البحث على التضارب المحتمل للمعايير ؟القانونية لتنفيذ لائحة وزير الداخلية رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ مع الأسئلة التالية :١ (ما هو موقف لائحة وزير الداخلية رقم ٢ ٢٠١٦ في نظام التشريع الإندونيسي؟ ٢ (ما هي الضرورة الملحة لسياسة بطاقة هوية الطفل في إندونيسيا؟

أهداف هذا البحث هي :١ (معرفة موقف لائحة وزير الداخلية رقم ٢ لعام ٢٠١٦ في نظام

التشريع الإندونيسي .٢ (لمعرفة مدى إلحاح سياسة بطاقة هوية الطفل

طريقة البحث المستخدمة هي البحث القانوني المعياري ذو الطبيعة الوصفية التحليلية .تستخدم هذه الدراسة مصادر بيانات ثانوية تحتوي على مواد قانونية أولية وثانوية .تحليل البيانات المستخدم هو أسلوب تحليل وصفي)تحليل وصفي (مع نهج قانوني.

نتائج البحث حول التضارب المحتمل للمعايير القانونية لتنفيذ لائحة وزير الداخلية رقم ٢ لعام ٢٠١٦ بشأن بطاقات هوية الطفل هي ١ (إنشاء لائحة سياسة بطاقة هوية الطفل من خلال لائحة وزير الداخلية رقم ٢ لعام ٢٠١٦ وهو مخالف للقوانين واللوائح السائدة في إندونيسيا .ويرجع ذلك إلى أن تشكيل لائحة وزير الداخلية رقم ٢ لعام ٢٠١٦ لا يتوافق مع القانون رقم ١٢ لعام ٢٠١١ بشأن إنشاء التشريع الذي ينص على أن كل لائحة تنفيذية بما في ذلك اللوائح الوزارية يجب أن تحتوي على متطلبين ، وهما أمران /مفوضان من قبل نظام أعلى ويتم تشكيله على أساس السلطة .إلى جانب ذلك ، المواد الواردة في لائحة وزير الداخلية رقم ٢ لعام ٢٠١٦ تتعارض مع المواد الواردة في القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٦ بشأن إدارة السكان ، وهي مادة المحتوى التي تتعارض مع الحد العمري لامتلاك بطاقة هوية في لائحة وزير الداخلية رقم ٢ لعام ٢٠١٦ التي سمحت للأطفال حديثي الولادة بالحصول على بطاقات هوية مؤقتة في القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠٠٦ تتطلب فقط ملكية بطاقات الهوية للمواطنين الذين يبلغون من العمر ١٧ عامًا ، لذلك يبدو أن اللائحة الوزارية هي معيبة رسميًا في تكوينها ومعيبة ماديًا في الجوهر .٢ (إنشاء اللائحة الوزارية رقم ٢ لعام ٢٠١٦ بشأن بطاقات هوية الطفل إذا تم تحليلها ولم تكن هناك حاجة فعلية من قبل المجتمع ، لأن وظائف وفوائد بطاقة هوية الطفل هي نفسها

تقريبًا شهادة الميلاد ، لذا فهي أقل فائدة في تطبيقها .هذه السياسة لديها القدرة على التسبب في تداخل إدارة الطفل.